

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL DAN BATUBARA DI ATAS WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

Minyak dan bumi merupakan salah satu bahan galian yang bersifat vital dan strategis. Hal ini menyebabkan pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi, sering kali ditemukan berbagai permasalahan di lapangan yang dapat menghambat kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, salah satunya adalah munculnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi di mana hal ini menimbulkan sengketa antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai peran pemerintah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi dan mengenai akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan memahami peran pemerintah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi serta akibat hukum terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan asas-asas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berupa batubara. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Penguasaan Pemerintah Daerah atas pemberian Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara seringkali diartikan keliru yaitu pemerintah daerah menganggap bahwa bahan galian mineral dan batubara yang terdapat dalam daerahnya adalah milik daerah tersebut dan yang berwenang sepenuhnya adalah pemerintah daerah. Hal ini yang dalam prakteknya menyebabkan pemerintah daerah dengan mudahnya mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu, sehingga dalam suatu Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat seringkali oleh pemerintah daerah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan bagi kontraktor mineral dan gas bumi.

Kata kunci: pertambangan, perizinan, migas, wilayah kerja migas, minerba.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN ISSUING THE MINING LICENSE OF MINERAL AND COAL ON THE WORKING AREA OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

Petroleum and natural gas is one of the vital and strategic minerals. Thereby, petroleum and natural gas mining have a very important position in supporting development in Indonesia. In the implementation of petroleum and gas mining, variety of problems that can inhibit petroleum and gas mining activities often can be found, one of them is the existence of Mining License of Mineral and Coal on the working area that cause dispute between the Contractor Partnership Contract of petroleum and natural gas and the holder of Mining License of Mineral and Coal. This research specifically discuss the role of the government in issuing the Mining License of Mineral and Coal on the working area and concerning legal consequences arising from the issuance of the Mining License of Mineral and Coal on the working area. The purpose of this research is to study the role of the government in issuing the Mining License of Mineral and Coal on the working area and concerning legal consequences arising from the issuance of the Mining License of Mineral and Coal on the working area of petroleum and natural gas.

The method that is used in this research is descriptive analytical, using the normative juridical approach method, by which it means doing research that count heavily on literature data or secondary data with principle of law approach.

The results of this research show that post regional autonomy, the local governments are authorized by the central government about control and management of natural resources in the form of coal. this is specified in the Law Number (No). 23 of 2014 on Local Government and the Law Number (No). 4 of 2009 on Minerals and Coal. Local Government's control over the granting of Mining License of Mineral and Coal is often misinterpreted. Local Government the local government considers that the minerals and coal within the area belong to the area itself and the fully authorized party is the Local Government itself. This in practice causes Local Government to simply issue Mining License without firstly coordinating with the central government, therefore in a working area determined by the Central Government a mining license is issued for mineral and natural gas contractors by the Local Government.

Keywords: *mining, license, petroleum and natural gas, mineral and coal.*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teori.....	11

2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Jenis Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Metode Analisa Data	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II PENGATURAN MINYAK DAN GAS BUMI	
DI INDONESIA.....	27
A. Hukum Pertambangan di Indonesia	27
1. Pengertian Hukum Pertambangan.....	27
2. Asas-asas Dalam Hukum Pertambangan	28
3. Sumber Hukum Pertambangan di Indonesia.....	29
B. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	30
1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi	30
2. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.....	31
C. Peran Pemerintah Dalam Kegiatan	
Usaha Minyak dan Gas Bumi	38
D. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	45
1. Kontrak dalam Minyak dan Gas Bumi.....	45
2. Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi	55

BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN	
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL	
DAN BATUBARA DI INDONESIA.....	62
A. Pertambangan Mineral dan Batubara	62
1. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara.	62
2. Penggolongan Bahan Tambang.....	63
3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan	
Mineral dan Batubara.....	65
4. Penerbitan Izin Dalam Usaha Pertambangan	
Mineral dan Batubara.....	66
B. Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	67
1. Pengaturan Umum Izin Usaha Pertambangan.....	67
2. Persyaratan Pengajuan Izin Usaha Pertambangan	73
3. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan.....	74
4. Wilayah Usaha Pertambangan	75
C. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan	
Pertambangan Mineral dan Batubara	76
1. Pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah	
Daerah	76
2. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Mineral	
dan Batubara.....	78

BAB IV	ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN AKIBAT HUKUM DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI ATAS WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.....	82
	A. Peran Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Di Atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.....	82
	B. Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	91
BAB V	PENUTUP.....	102
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran.....	105
	Daftar Pustaka.....	108
	Curriculum Vitae.....	110